



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN  
**SUB UNIT KERJA** : BIDANG LALU LINTAS JALAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AKHMAD SYAIFILLAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN
3. NHK : 217955

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KOTA SALATIGA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KOTA SALATIGA ,  
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Tanah Seluas 1600 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/240 m2 di BOYOLALI, HASIL  
SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 194.500.000**

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 160.000.000
2. MOTOR, SUZUKI THUNDER SEPEDA MOTOR Tahun 2004,  
HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA C70 SEPEDA MOTOR Tahun 1978, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL  
SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL  
SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 64.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.411.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.322.911.000
III. HUTANG	Rp.	281.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.041.911.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.